

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan isi dari pembahasan yang dikaji dalam skripsi yang penulis susun ini. kesimpulan yang disajikan merujuk pada jawaban dari masalah penelitian yang diajukan pada bab satu. Selain itu juga penulis akan memberikan saran atau rekomendasi bagi perkembangan penelitian terkait topik atau tema yang sama atau beririsan dengan tema sejarah yang diteliti ini.

#### **5.1. Kesimpulan**

Pada masa Orde Baru Sudomo memegang beberapa jabatan militer yang penting, yakni Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Kopkamtib dan Panglima Kopkamtib. Presiden Suharto menarik orang-orang kepercayaannya untuk membantunya dalam mengkonsolidasikan kekuatan politiknya dalam rezim Orde Baru.

Pengalaman mengesankan saat bekerjasama dengan Sudomo ketika Operasi Mandala membuat Suharto mempercayakan jabatan Kepala staf Angkatan Laut pada Sudomo. Saat itu Suharto menginginkan agar kelompok yang diduga pro PKI dan loyalis Sukarno dapat ditundukan dan tidak menjadi ancaman bagi keberjalanan pemerintahan yang sedang dia bangun. Dari ketiga angkatan militer yang ada yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL), Angkatan Lautlah yang memiliki basis loyalis Sukarno terkuat. Bahkan pada masa Presiden Sukarno, Korps Marinir menjadi armada militer andalan Presiden Sukarno.

Maka Sudomo ditunjuk sebagai KASAL untuk dapat meredam ancaman dari orang-orang di AL yang pro Orde Lama dan anti terhadap Orde Baru. Dalam mencapai tujuan tersebut maka Sudomo menerapkan Reorganisasi struktur di dalam tubuh Angkatan Laut dan melakukan rasionalisasi anggota. Pengurangan jumlah perwira dilakukan secara besar terutama terhadap mereka yang diduga pro PKI dan loyalis Sukarno. Program tersebut dikenal dengan nama sandi Operasi Ikan Paus.

Keberhasilan Sudomo dalam mengelola Angkatan Laut sesuai keinginan Suharto membuatnya kembali dipercaya untuk menjadi wakil Panglima Kopkamtib mendampingi Jenderal Sumitro pada tahun 1973. Namun peristiwa Malari membuat Sumitro kehilangan kepercayaan dari atasannya, Suharto. Presiden Suharto akhirnya mengambil sendiri posisi Panglima Kopkamtib dan menunjuk Sudomo sebagai pelaksana tugas harian atau *care taker*-nya dengan jabatan Kepala Staf Kopkamtib atau KasKopkamtib. Keberhasilan Sudomo dalam menangani berbagai ancaman keamanan membuat Suharto tak ragu untuk menyerahkan jabatan Panglima Kopkamtib kepada Sudomo pada tahun 1978. Pada masa ini Sudomo mampu menunjukkan kekuatan Orde Baru.

Jika pada saat Sudomo menjadi KASAL adalah masa-masa konsolidasi kekuatan Orde Baru, maka saat Sudomo menjadi Pangkopkamtib Suharto telah menancapkan kekuasaannya secara mengakar di Indonesia. Pada masa ini juga stabilitas keamanan Nasional mampu dijaga dengan baik. Jadi dalam bidang militer Sudomo berperan sebagai tangan kanan Suharto untuk menumpas ancaman dari pihak-pihak yang berniat mengganggu kenyamanan dan keamanan Presiden Suharto dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjaga kestabilan keamanan nasional. Kepercayaan dan kedekatan Suharto dengan Sudomo pun semakin menguat. Sudomo bahkan memiliki akses langsung untuk menghubungi Presiden. Ketika menjadi Pangkopkamtib Sudomo juga menjabat sebagai Wakil Panglima ABRI.

Setelah habis masa bakti sebagai Pangkopkamtib, Sudomo sebenarnya berniat pensiun, namun Suharto merasa bahwa amat disayangkan jika kemampuan Sudomo disia-siakan. Maka pada masa ini Presiden Suharto menarik Sudomo kedalam Kabinet pemerintahan. Pertama Sudomo dipercaya sebagai Menteri Tenaga Kerja kemudian pada periode selanjutnya Sudomo dipercaya memegang Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Saat menjadi Menteri Tenaga Kerja Sudomo memiliki tugas untuk dapat menangani masalah pengangguran dan kualitas ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia Indonesia untuk dapat meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah seperti yang telah disusun dalam Rencana

Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA keempat. Selain itu juga Sudomo bertugas untuk meredam ancaman keamanan yang mungkin timbul dari demo para buruh atau pekerja.

Saat menjadi Menko Polkam Sudomo bertugas sebagai tameng dari beragam kritik yang muncul terhadap kebijakan pemerintah. Seringkali Sudomo tampil kedepan media untuk menghadapi berondongan pertanyaan wartawan baik dalam maupun luar negeri. Suharto juga memberi tugas khusus kepada Sudomo untuk mengawasi pergerakan beberapa jenderal AD yang dikhawatirkan mengganggu kenyamanan kekuasaan Presiden.

Selama menjalankan tugasnya di pemerintahan Sudomo mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga ketika habis masa tugas sebagai Menko Polkam Sudomo dipercaya oleh Presiden untuk menjadi bagian dari Anggota Dewan Penasihat Agung (DPA) dan Sudomo terpilih menjadi Ketua DPA. Di tengah masa tugas sebagai Ketua DPA Sudomo harus menghadapi masalah kasus Bapindo yang turut menyeret namanya. Namun dengan akses kekuasaan yang dimiliki, Sudomo berhasil lolos dari jerat hukum dan statusnya tak lebih dari sekedar saksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam bidang politik Sudomo ikut berperan dalam pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Suharto baik sebagai Menaker, Menko Polkam maupun Ketua DPA. Tetapi disamping itu Sudomo juga memiliki tugas khusus untuk ikut tetap menjaga keamanan, kenyamanan, serta kepentingan pemerintah yang dijalankan oleh Presiden Suharto.

Sudomo adalah tokoh bangsa yang memiliki banyak jasa pada Negara, namun disisi lain Sudomo tak lepas dari pemberitaan negatif. Posisinya sebagai orang dekat Presiden dan menjadi bagian dari kekuatan Orde baru menjadikan setiap tindakan dan kebijakannya menuai pro dan kontra. Sumitro sebagai kawan dekatnya menilai Sudomo sebagai tokoh yang bertanggung jawab, berani mengambil tindakan tegas dan mampu mengelola manajemen dengan baik. Suharto sendiri sebagai atasannya menjadikan Sudomo sebagai tangan kanannya. Presiden Suharto mempercayakan banyak tugas khusus kepada Sudomo. Bahkan Sudomo memiliki akses langsung kepada Presiden. Ali Sadikin yang meskipun bersebarangan arah politik tetap

memandang Sudomo sebagai tokoh bangsa yang baik. Meski kerap bersinggungan dalam pandangan politik, keduanya tetap memiliki kedekatan karena bertetangga.

## 5.2. Saran

### 5.2.1. Saran Bagi Pembaca

Dalam menyusun skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangan di dalamnya. Maka untuk pengembangan pembahasan tema atau topik sejarah terkait isu politik Orde Baru penulis berharap agar dapat terus dikembangkan. Dari skripsi ini sendiri beberapa hal bisa dikembangkan atau diteliti lebih dalam lagi, diantaranya:

Pertama, pembahasan mengenai lembaga Kopkamtib, karena seperti yang diketahui Kopkamtib adalah lembaga militer yang memiliki kekuatan serta akses luas dalam menjalankan perangkat militer yang ada. Maka Suharto memanfaatkan lembaga tersebut untuk menjaga kekuasaannya. Menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai tugas, peran, serta fungsi lembaga tersebut baik secara struktur maupun legalitas keberadaannya.

Kedua, mengenai dinamika hubungan Sudomo dan Ali Sadikin sangat menarik untuk dibahas lebih jauh lagi. Sudomo dan Ali Sadikin sama-sama berasal dari Angkatan Laut dan keduanya pernah menjadi orang nomor satu di angkatan tersebut. secara personal juga rumah keduanya bersebarangan di di jalan Borobudur nomor 2 dan nomor 5 Jakarta. Namun hal tersebut justru seperti menggambarkan bersebarangannya arah politik keduanya, dimana kedua tokoh tersebut mewakili sisi pro dan kontra dari pemerintah Orde Baru.

Bagi para pembaca baik di kalangan akademisi, maupun umum skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan pilihan referensi mengenai kajian sejarah Orde Baru. Hasil penelitian skripsi ini juga diharapkan memberikan sudut pandang baru mengenai sejarah politik di Orde Baru utamanya mengenai tokoh-tokoh politik bangsa. Selain itu penulis berharap dapat memperkaya penulisan karya tulis ilmiah mengenai biografi tokoh nasional di lingkungan Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

### 5.2.2. Pentingnya Siswa Belajar Dari Sudomo dan Orde Baru

Historia Magistra Vitae, kalimat itu diucapkan oleh Cicero yang artinya “sejarah adalah guru kehidupan”. Kalimat tersebut kemudian ditambahkan lagi oleh pemimpin fasis Italia Musolini bahwa sejarah adalah guru kehidupan dan kita adalah murid-muridnya yang tolol. Kalimat tersebut ditunjukan kepada manusia-manusia yang melakukan kesalahan karena tidak belajar dari masa lalu. Maka sangat penting bagi kita untuk mengajarkan sejarah kepada pemuda generasi penerus bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

Banyak tokoh-tokoh bangsa yang patut kita pelajari dan mengambil nilai dari perjuangannya. Mungkin terkadang tokoh tersebut tidaklah sempurna atau sebaik nabi, namun memiliki peran begitu penting bagi pembangunan dan perjuangan nasional.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia begitu panjang sejak masa penjajahan, kemerdekaan, hingga masa pembangunan. Salah satu babak sejarah Indonesia yang penting untuk kita pelajari adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru terkenal dengan upaya pembangunan nasional besar-besaran, bahkan Presiden Suharto diberi gelar sebagai Bapak Pembangunan. Ditengah megahnya pembangunan yang dilakukan rezim Suharto tak terlepas pula dari banyak kontroversi. Kontroversi tersebut bahkan telah dimulai dari awal lahirnya rezim tersebut.

Lahirnya Orde Baru dimulai dari satu peristiwa besar Gerakan 30 September. 1965. Peristiwa tersebut telah menarik bangsa ini pada babak baru dan dalam proses perubahannya telah merenggut banyak nyawa. Dari sanalah tugas guru sejarah untuk memberikan nilai pelajaran sejarah agar melahirkan siswa-siswa yang bijaksana dan peristiwa berdarah tersebut tidak terulang kembali dalam perjalanan bangsa ini kedepannya.

Pembangunan Orde Baru selama 32 tahun telah melalui banyak hal dan melibatkan banyak tokoh. Salah satu tokoh penting yang ikut berperan besar dalam proses pembangunan tersebut adalah Sudomo. Sudomo adalah salah satu tokoh yang

selalu berada di lingkaran kekuasaan Presiden Suharto. Maka mempelajari Orde Baru takan terlepas dari peranan Sudomo di dalamnya (Wilson, 1992, hlm. 56).

Kerjasama Suharto dan Sudomo dimulai ketika Operas Pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Operasi Mandala. Saat itu Suharto memimpin Operasi Mandala dan Sudomo menjadi wakilnya. Kerjasama keduanya dinilai sukses, dan nampaknya memberi kesan baik bagi Suharto terhadap Sudomo. Maka ketika Suharto berada di puncak kekuasaan Sudomo ia tempatkan untuk memimpin Angkatan Laut. Sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Sudomo memiliki tugas penting untuk menghapuskan sisa kekuatan Orde lama dalam tubuh Angkatan Laut serta mengkonsolidasikan kekuatan Ore Baru. Sudomo dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan kemampuan manajemen yang baik Sudomo melakukan reorganisasi dan restrukturisasi Angkatan Laut. Untuk menyingkirkan sisa-sisa kekuiatan Orde Lama dalam tubuh AL dilakukan dengan Operasi Ikan Paus dan rasionalisasi jumlah anggota (Pour, 1997 hlm. 122).

Tugas baik yang dijalankan Sudomo sebagai KASAL membuatnya ditarik ke dalam Kopkamtib. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) adalah salah satu lembaga militer yang menjadi alat Suharto untuk merebut kekuasaan. Kopkamtib dibentuk Presiden Sukarno pasca terjadinya penculikan para Jenderal pada 30 September 1965. Lembaga tersebut dibentuk untuk memulihkan situasi dan kondisi politik dan keamanan nasional pasca terjadinya peristiwa G30S. Suharto ditunjuk oleh Preisden Sukarno untuk memimpin Kopkamtib. Pada perkembangan selanjutnya Suharto menjadi Kopkamtib sebagai alat kekuasaannya, salah satu tokoh yang pernah menjadi Panglima Kopkamtib adalah Sudomo. Selain menjadi Panglima Kopkmatib Sudomo juga sempat memegang beberapa jabatan penting pada masa Orde Baru. Jabatan tersebut ada yang berupa jabatan militer maupun jabatan politik dalam pemerintahan (Pour, 1997 hlm 119).

Jabatan militer yang pernah dipercayakan kepada Sudomo diantaranya, Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Panglima Kopkamtib, Kepala Staf Kopkamtib, hingga Panglima Kopkamtib. Dalam militer Sudomo memiliki peran untuk menjaga

stabilitas keamanan nasional dan memulihkan keadaan yang mengganggu ketertiban masyarakat terutama saat menjadi Panglima Kopkamtib.

Jabatan politik yang pernah dipegang Sudomo adalah Menteri Tenaga Kerja, Menko Polkam, hingga terakhir menjadi Ketua DPA. Setelah pensiun dari militer dan menjadi menteri Sudomo tetap menjadi orang kepercayaan Suharto.

Tak jauh berbeda dengan saat di militer, Sudomo masih bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, hal itu terlihat saat menjadi Menaker dan Menko Polkam. Sudomo ditempatkan pada posisi Menaker agar bisa mengontrol dan mengkoordinir para pekerja di Indonesia (Elson, 2005, hlm. 464).

Pada saat menjadi Menko Polkam tugas utama Sudomo adalah menjadi tameng terhadap kritik yang ditujukan bagi program serta kebijakan pemerintah. Sudomo harus dapat memastikan situasi politik dan keamanan tetap kondusif (Wilson, 1992, hlm. 108).

Mempelajari mengenai Sudomo memberi manfaat bagi siswa untuk dapat mengetahui strategi dan pergerakan pemerintah Orde Baru dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan baik oleh Orde Baru. Selain itu juga para siswa dapat meneladani sifat-sifat baik dari tokoh tersebut. Sifat yang dapat diteladani dari Sudomo diantaranya sifat disiplin, tegas, dan kemampuan manajemen yang baik. Terlepas dari segala kontroversinya pula. Beberapa tindakan kontroversi Sudomo diantaranya kebijakan petrus, penckalan terhadap anggota Petisi 50, dan kasus Bapindo.

Kasus Bapindo adalah kasus Mega Korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kasus tersebut turut menyeret nama Sudomo. Sudomo terbukti telah memberi rekomendasi dalam bentuk katebelce kepada Kepala Bapindo untuk menyetujui permohonan kredit dari Eddy Tansil pimpinan grup usaha Golden Key. Namun ternyata kucuran dana pinjaman triliyuan rupiah dari Bapindo digelapkan oleh Eddy Tansil sehingga Negara merugi besar. Sudomo juga diduga menerima imbalan atas bantuannya kepada Eddy Tansil tapi hal tersebut tak pernah terbukti (Suwirta, 2018, hlm. 174).

Namun selain itu juga tentu saja terdapat kisah perjuangan berjuang yang dapat kita teladani. Seperti saat Sudomo ikut berjuang dalam Operasi Mandala yang sukses sehingga turut mempengaruhi kemenangan Indonesia dalam perjuangan diplomasi untuk mendapat pengakuan Irian Barat (Hasyim, 1994, hlm. 9-10).

Pendidikan menjadi sarana utama bagi upaya untuk memajukan bangsa dengan mencerdaskan masyarakat sesuai amanat undang-undang dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar terwujud hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini telah menyusun seperangkat kurikulum pendidikan yang harus dijalankan oleh seluruh lembaga pendidikan resmi yang bernaung dibawah pemerintah baim itu yang berstatus negeri maupun swasta. Dalam perangkat kurikulum tersebut disusunlah suatu standar kompetensi pembelajaran mulai dari Kompetensi Inti hingga Kompetensi Dasar. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) itulah yang menjadi acuan bagi para guru di sekolah dalam membuat silabus pembelajaran.

Dalam materi pembelajaran di sekolah pembahasan mengenai Orde Baru terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.14 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan juga Kompetensi Dasar (KD) 4.14 Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kedua KD tersebut diajarkan di kelas 12 SMA/MA dan sederajat lainnya (Permendikbud RI No. 37 thn 2018, hlm. 378).

Maka dalam pembelajaran di kelas wajib bagi guru untuk menyampaikan materi mengenai perkembangan sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Kompetensi Dasar (KD) 3.14 dan Kompetensi Dasar (KD) 4.14 menginstruksikan kepada guru untuk membahas mengenai perkembangan politik dan ekonomi Orde Baru. Hal tersebut memang menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dengan Orde Baru. Rezim Orde Baru sangat mengedepankan pembangunan, agar pembangunan dapat tercapai dengan baik maka stabilitas politik dan keamanan harus dijaga.

Relevan dengan yang telah dijelaskan diatas mengenai tugas-tugas dan jabatan yang dipegang Sudomo terutama Kopkmatib. Maka pembahasan mengenai sepak terjang tokoh Orde Baru tersebut sangat layak, sesuai dan perlu untuk diketahui



oleh para siswa sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam KD 3.14 dan 4.14 mengenai perkembangan politik dan ekonomi Orde Baru. Mempelajari mengenai Sudomo juga akan menambah khasanah pengetahuan siswa mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa Orde Baru.

Tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru tentu saja tidak bisa dibilang sebentar apalagi dianggap angin lalu. Banyak hal yang telah terjadi selama masa pemerintahan Presiden Suharto tersebut. Banyak dari kebijakan-kebijakan terdahulu pak Harto yang berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan banyak kebijakannya yang masih ada hingga sekarang, seperti program Keluarga Bencana, dan program Wajib Belajar.

Sejarah Orde Baru adalah sejarah kontemporer yang jarak waktunya tidak terlalu lama dengan kehidupan para siswa. Hal tersebut menjadi motif siswa untuk mencoba mencari tahu lebih mengenai masa-masa tersebut. Meskipun para siswa tersebut tidak hidup di zaman Orde Baru namun banyak sekali media dan sumber yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat saat itu. Bahkan di zaman ini informasi dapat di dapatkan dengan mudah melalui internet. Namun banyaknya informasi tersebut dapat berbahaya bagi para siswa jika tidak disaring dan diberi pemahaman lebih. Maka tugas pendidik untuk mengarahkan siswa.